

**PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN, DERAJAT DESENTRALISASI  
DAN KESELARASAN BELANJA DALAM MEMPREDIKSI STATUS  
FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2015-2017**

*The Effect Of Financial Independence, Degree Of Decentralization And Shopping  
Harmony In Predicting The Status Of Financial Distress Of Regency And City  
Governments In West Sumatra Province 2015-2017*

**Fitrah Illahi; Rice Haryati; Dica Lady Silvera**

Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang

E-mail : *Fitrahillahiii@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi status financial distress pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan, derajat desentralisasidan keselarasan belanja secara parsial maupun simultan terhadap financial distress pemerintah daerah di Sumatera Barat tahun 2015-2017. Metode penentuan sampel menggunakan teknik total sampling yaitu seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Baratmelalui laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit yaitu laporan hasil pemeriksaan tahun 2015-2017. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan keselarasan belanja berpengaruh dalam memprediksi status financial distress. Hasil uji simultan menunjukkan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi dan keselarasan belanja berpengaruh dalam memprediksi satatus financial distress.*

**Kata kunci: financial distress, kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, keselarasan belanja**

**ABSTRACT**

*This study aims to predict the financial Distress status of district and city governments in West Sumatra Province. This research was conducted to determine the effect of financial independence, the degree of decentralization and the alignment of spending partially and simultaneously on the financial distress of local governments in West Sumatra in 2015-2017. The method of determining the sample uses a total sampling technique that is all district / city regional governments in West Sumatra through the audited regional government financial reports, namely the 2015-2017 inspection report. The type of data used is secondary data. Data collection techniques is by way of documentation. The analysis used is binary logistic regression analysis. The research results partially show that the alignment of spending influences the prediction of financial distress status. Simultaneous test results show financial independence, the degree of decentralization and the alignment of spending affect the status of financial distress.*

**Keywords: financial distress, financial independence, degree of decentralization, alignment of spending**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pada masa sekarang ini Indonesia sudah menganut sistem otonomi daerah sudah lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah pada hakikatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa : pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur dan penyediaan barang kebutuhan publik.

Pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyediakan barang dan jasa terhadap masyarakat seperti: pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Tujuan penyediaan barang dan jasa ini adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD. Diharapkan penyediaan barang dan jasa ini dapat menjadi *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD. Pada pemerintah daerah, kekuatan (*power*) sumber daya keuangan dapat tercermin dari besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut. Menurut Undang- Undang No. 33 Tahun 2004, Pemerintah Daerah memiliki tiga komponen sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah rendah akan membutuhkan dana dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan akan memiliki kekuatan untuk *survive* dan terhindar dari *financial distress*.

*Financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Kondisi ini memberikan implikasi tidak terpenuhinya tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat berupa tidak tersedianya dana untuk infrastruktur untuk pelayanan publik akibat kondisi keuangan dari pemerintah dalam keadaan kurang stabil walaupun dalam tingkatan yang lemah, sehingga menjadi sebuah sinyal buruknya kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini.

Berdasarkan data deskripsi dan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Republik Indonesia (KEMENKEU-RI) menyebutkan bahwa rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja secara agregat provinsi, kabupaten dan kota sebesar 24,81%. FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi) menjelaskan dalam Laporan Analisis Anggaran Daerah Tahun 2016 hasil penelitian di 70 kabupaten/kota bahwa rata-rata belanja modal terhadap total belanja sebesar 21% masih dibawah standar yang ditetapkan, bahkan pada observasi laporan keuangan periode 2015-2017 masih terdapat persentase belanja modal yang berkisar hanya 9-10% saja. Dalam hasil analisa pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2016, yang menyatakan bahwa porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sumatera Barat tahun 2016 ternyata relatif rendah, yakni hanya 22,56% dari total belanja daerah. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, bahwa porsi belanja modal yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Belanja modal yang rendah akan berdampak pada rendahnya pembangunan infrastruktur membuat pelayanan menjadi tidak memadai sehingga pemerintah daerah berpotensi untuk mengalami *financial distress*.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Rusdi dan Fuad (2018) yang meneliti tentang metode prediksi Financial distress di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa tengah. Dalam penelitiannya *financial distress* diprediksi di pemerintah daerah dengan mengukur dari sisi keuangan yang menggunakan analisis dari kemandirian pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatannya, keselarasan pembelanjaan yang dilakukan pemerintah daerah yang tidak hanya terfokus pada belanja rutin serta rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Penelitian mengenai prediksi *financial distress* ini dilakukan mengingat pentingnya peran pemerintah bagi masyarakat sehingga pemerintah perlu mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi prediksi *financial distress* agar dapat terhindar dari kondisi *financial distress*, serta perbedaan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mengacu pada penelitian Syurmita (2014) yang meneliti tentang prediksi *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, dimana indikator-indikator prediksi *financial distress* adalah kemandirian keuangan, desentralisasi, solvabilitas dan pemekaran wilayah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel independennya. Peneliti tidak menggunakan variabel pemekaran wilayah tetapi menggunakan variabel keselarasan belanja dan mengganti periode waktu yang lebih panjang dan baru yaitu 2015-2017, serta objek penelitian ini yaitu di kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui apakah kemandirian keuangan, derajat desentralisasi dan keselarasan belanja berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi sumatera barat.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja Dalam Memprediksi Status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Kemandirian Keuangan berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017?
2. Apakah Derajat Desentralisasi berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017?
3. Apakah Keselarasan Belanja berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017?
4. Apakah Kemandirian keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja berpengaruh secara simultan dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Kemandirian Keuangan berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017?
2. Untuk mengetahui apakah Derajat Desentralisasi berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017?
3. Untuk mengetahui apakah Keselarasan Belanja berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017?
4. Untuk mengetahui apakah Kemandirian keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja berpengaruh secara simultan dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017?

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Teori Ketergantungan Sumber daya

Teori ketergantungan sumber daya dikemukakan oleh Emerson (1961) menjelaskan tentang hubungan antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan dalam suatu organisasi. Ketergantungan merupakan bagian utama dari kekuasaan, dimana organisasi yang memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar terkait tugas dan wewenang organisasi tersebut, untuk mengatur hubungan saling ketergantungan organisasi dapat memakai strategi kerjasama dari Prespektif yang dibangun oleh Pfeffer dan Salancik (1978) dalam (Syurmita,2014), menjelaskan bahwa organisasi menurut mereka bergantung secara eksternal terhadap *resources* dan sumber daya dapat memberikan pengaruh kekuasaan kepada organisasi. Sumber daya dapat memberikan pengaruh kekuasaan terhadap organisasi dalam melakukan perubahan signifikan dan pencapaian tujuan organisasi. Teori ketergantungan sumber daya menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mengelola dan mengurus daerahnya masing-masing.

Ketergantungan sumber daya pada sektor publik menggambarkan kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam mencapai tujuan organisasi untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat.

#### *Financial Distress*

Pada sektor pemerintahan, *financial distress* adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Salah satu standar mutu pelayanan ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah alokasi belanja modal. Menurut Jones dan Walker (2007), *financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut.

### **Kemandirian Keuangan**

Menurut Rukmana (2013) “kemandirian keuangan adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan-perundangan.”

Semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah berarti daerah tersebut memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengalokasikan belanja modal lebih banyak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga probabilitas mengalami *financial distress* akan kecil kemungkinannya dibandingkan dengan daerah yang kemandirian keuangannya rendah.

### **Derajat Desentralisasi**

Di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2005 tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat .

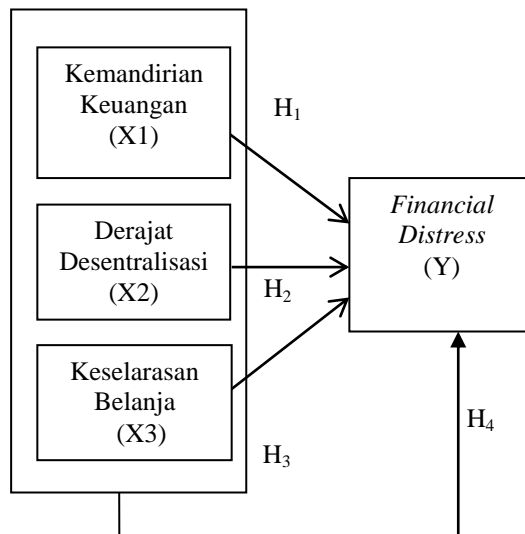
Menurut Mahmudi (2016 : 140) “Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan total pendapatan daerah”. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

### **Keselarasan Belanja**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Rasio Keselarasan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Keselarasan belanja yang lebih rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja semakin banyak dialokasikan untuk kegiatan yang berhubung langsung dengan program pemerintah daerah.

## Kerangka Konseptual



## METODE PENELITIAN

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.

### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Kuncoro, Mudrajat (2011) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang sudah dimiliki lembaga pengumpul data. Data dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2015-2017 yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Pusat.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang berjumlah 19 kabupaten/kota.

Sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Etikan *et al* (2016) menjelaskan total sampling merupakan jenis teknik pengambilan keputusan dimana seluruh populasi yang memenuhi kriteria termasuk dalam penelitian sedang dilakukan. Jumlah sampel sama dengan populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini, sehingga seluruh menjadi sampel yang akan diteliti.

### Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi logistik biner. Hosmer dan Lemeshow (2000) menjelaskan bahwa regresi logistik biner merupakan suatu metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel respon (y) yang bersifat biner atau dikotomi dengan variabel prediktor (x) yang bersifat

polikotomi. *Output* dari variabel respon  $y$  terdiri dari 2 kategori yang dinotasikan dengan  $y = 1$  (*non financial distress*) dan  $y = 0$  (*financial distress*). Kategori tersebut didasarkan pada rasio belanja modal.

Model persamaan regresi logistik biner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

$$\ln \frac{p}{p-1} = \beta_0 + \beta_1 (\text{KK}) + \beta_2 (\text{DD}) + \beta_3 (\text{KB})$$

### Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Uji Nilai *Likelihood* digunakan untuk menguji model regresi logistik biner. Uji ini menunjukkan apakah dengan penambahan variabel bebas ke dalam model regresi dapat memperbaiki model regresi dalam memprediksi variabel dependen penelitian. Nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  digunakan untuk melihat kesesuaian model yang telah digunakan, yang caranya dilakukan dengan membandingkan nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  sebelum ditambah variabel independen dengan nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  setelah ditambah variabel independen. Jika terjadi penurunan nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  dari sebelum penambahan variabel independen ke sesudah penambahan variabel independen, maka model regresi layak untuk digunakan, karena penambahan variabel independen dapat memperbaiki model *fit* dalam model regresi logistik biner penelitian ini.

### Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R<sup>2</sup>*)

Uji nilai *Nagelkerke R<sup>2</sup>* mirip dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam pengujian dengan model regresi berganda yang menjelaskan seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabilitas variabel dependen dalam model yang digunakan oleh penelitian ini. Nilai *Nagelkerke R<sup>2</sup>* bervariasi antara 1 sampai 0. Semakin mendekati 1, maka dianggap sebagai *goodness of fit* dan sebaliknya ketika mendekati 0, maka dianggap tidak *goodness of fit*.

### Menguji Kelayakan Model Regresi (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*)

Uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model regresi dalam penelitian atau tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model penelitian dapat dikatakan *fit*. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih kecil atau sama dengan tingkat signifikansi penelitian 5%, maka terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi observasinya. Sebaliknya, jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05 maka model mampu memprediksi nilai observasi atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena cocok dengan data observasi penelitian.

### Metode Pengujian Hipotesis

#### Uji Signifikansi Secara Simultan (Omnibus Test of Model Coefficients)

Tabel Omnibus Test of Model Coefficients menunjukkan signifikansi model regresi biner logistik yang diperoleh dari hasil penelitian. Apabila nilai  $\text{Sig} < \alpha = 0,05$  maka dapat diasumsikan setidaknya ada satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap model (Pramesiti, 2013: 64).

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh dalam memprediksi status *financial distress*.

### Uji Estimasi Parameter secara parsial (Uji Wald)

Parameter atau koefisien regresi merupakan nilai yang menggambarkan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan melihat nilai wald test dan tingkat signifikansi (sig) masing-masing variabel independen pada taraf kelayakan 5%. Jika nilai sig wald test  $< \alpha 0,05$  dan koefisien sesuai dengan yang di hipotesiskan, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen sebaliknya Jika nilai sig wald test  $> \alpha 0,05$  dan koefisien sesuai dengan yang di hipotesiskan, maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data laporan keuangan dari tahun 2015-2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2015-2017 terdapat 19 kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Barat.

Sampel dalam penelitian ini adalah total sampling, yaitu menjadikan seluruh populasi sebagai sampel dalam penelitian. Sampel yang dipakai berjumlah 57 sampel. Adapun variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kemandirian keuangan, Derajat desentralisasidan Keselarasan belanja. Sedangkan variabel dependennya adalah *financial distress*, yang diukur dengan menggunakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah.

### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif penelitian digunakan untuk mengetahui terkait deskripsi dari data yang diteliti dengan melihat dari nilai minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi agar data lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik Deskriptif tentang pengaruh Kemandirian keuangan, derajat desentralisasi dan keselarasan belanja dapat diperoleh dengan menganalisis terlebih dahulu data sebelum melakukan pembahasan mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap *financial distress*.

### Menilai Keseluruhan Model

$-2 \log likelihood$  dapat digunakan untuk melihat kelayakan model yang digunakan dalam penelitian. Pengujian terkait dengan nilai ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $-2 \log likelihood$  sebelum ditambah variabel independen dengan nilai  $-2 \log likelihood$  setelah ditambah variabel independen. Jika terjadi penurunan nilai dari  $-2 \log likelihood$  sebelum ditambah variabel independen ke  $-2 \log likelihood$  setelah ditambah variabel independen, maka model yang dipakai layak atau cocok.

Hasil Pengujian Likelihood		
	Iteration	-2log likelihood
Step 0	Initial	58.670
Step 1	Model Summary	47.995

Sumber : Data Sekunder yang Diolah



Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	10.675	3	.014
		10.675	3	.014
	Model	10.675	3	.014

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan nilai, dapat dijelaskan bahwa nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  sebelum adanya variabel independen pada step 0 adalah sebesar 58.670 dan mengalami perubahan menjadi 47.995 setelah ditambah variabel independen. Penurunan terjadi yang dijelaskan dari tabel 4.8 sebesar 10.675 menunjukkan bahwa secara keseluruhan model adalah baik dan mampu untuk menguji hipotesis. Tabel yang ada juga menyajikan *chi-square* dengan nilai sebesar 10.675 yang menandakan bahwa model penelitian ini fit dengan data yang ada.

#### Koefisien Determinasi (*Uji Nagelkerke's R Square*)

Uji nilai *nagelkerke R<sup>2</sup>* digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dalam model yang digunakan pada penelitian ini.

Hasil Pengujian Nagelkerke R Square			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	47.995 <sup>a</sup>	.171	.266

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian *Nagelkerke R Square* yang tersaji dalam tabel diatas, nilai dari *Nagelkerke R Square* adalah 0,266 variasi yang terjadi pada variabel *financial distress* dijelaskan oleh variabel yang diteliti. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan, derajat desentralisasi dan keselarasan belanja dianggap mampu menjelaskan pengaruh terhadap *financial distress* dalam model yang digunakan sebesar 26,6% , sedangkan 73,4% lainnya dijelaskan oleh faktor di luar penelitian.

#### Menguji Kelayakan Model Regresi (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*)

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	Df	Sig.
1	3.613	8	.890

Tabel hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* yang dilakukan menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 3.613 dan signifikansi sebesar 0,890 dan nilai  $0,890 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data empiris dalam penelitian ini cocok, atau sesuai dengan model regresi dalam penelitian ini atau tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model penelitian dapat dikatakan *fit* dan penelitian dapat dilanjutkan.

## Hasil Uji Hipotesis

### Uji Signifikansi Secara Simultan (Omnibus Test of Model Coefficients)

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	10.675	3	.014
	Block	10.675	3	.014
	Model	10.675	3	.014

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2019)

Berdasarkan tabel diatas nilai Omnibus Test of Model dilihat dari uji Chi Square yang mempunyai nilai 10,675 dengan  $df = 3$ . Hasil tersebut berarti model regresi logistik biner layak dipakai untuk analisis selanjutnya. Hasil Chi Square didukung oleh nilai signifikansi  $>0,05$ . Untuk nilai signifikan omnibus test sebesar 0,014 yang berarti  $< 0,05$  karena menggunakan taraf kepercayaan 95%. Omnibus Test menghasilkan nilai signifikansi yang lebih rendah dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari setidaknya satu variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

### Uji Estimasi Parameter secara parsial (Uji Wald)

Sutaryo (2010) menyatakan bahwa parameter atau koefisien regresi merupakan nilai yang menggambarkan besaran dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dalam penelitian ini kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari 5%, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sebaliknya jika nilai probabilitas variabel independen lebih besar dari 5% maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Hasil Pengujian Parameter Logistik							
Variabel	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp (B)	Kesimpulan
Kemandirian Keuangan	46.004	44.578	1.065	1	.302	95364945644485310000.000	H <sub>1</sub> Ditolak
Derajat Desentralisasi	-70.426	59.798	1.387	1	.239	.000	H <sub>2</sub> Ditolak
Keselarasn Belanja	-2.570	1.130	5.175	1	.023	.077	H <sub>3</sub> Diterima
Constant	2.808	1.484	3.579	1	.059	16.572	

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Mengacu pada output tabel diatas, diketahui bahwa variabel yang memiliki nilai  $Sig. < 0,05$  adalah Keselarasn Belanja yaitu sebesar 0,023. Dengan demikian, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap prediksi *financial distress*, sedangkan variabel lain seperti kemandirian keuangan nilai signifikansinya  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,302 dan derajat desentralisasi sebesar 0,239 maka variabel kemandirian keuangan dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi *financial distress*.

### Pengaruh Kemandirian Keuangan dalam memprediksi status *Financial distress*

Hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) yaitu Kemandirian keuangan berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis pertama ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,302 dan koefisien 46.004. Nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih besar dari pada nilai alpha (0,05) atau ( $> 0,05$ ), sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan kemandirian keuangan tidak berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress*. Maka penelitian ini tidak

berhasil mendukung hipotesis pertama dan tidak sejalan dengan penelitian terdahulu dari Syurmita (2014) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi (tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat atau daerah) maka tidak akan mengalami *financial distress* atau mempunyai ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan daerah dan memperoleh hasil bahwa kemandirian keuangan mampu memprediksi dan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

#### **Pengaruh Derajat Desentralisasi dalam memprediksi status *Financial distress***

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) dalam penelitian ini yaitu Derajat Desentralisasi berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua memiliki nilai signifikansi 0,239 dan koefisien -70.426. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 5% menunjukkan bahwa derajat desentralisasi tidak mampu dalam memprediksi status *financial distress*, sehingga penelitian ini gagal mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi mempunyai kemampuan dalam memprediksi *financial distress* pemerintah daerah dan tidak sejalan dengan penelitian terdahulu dari Syurmita(2014) yang memperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi mampu memprediksi *financial distress*.

#### **Pengaruh Keselarasan Belanja dalam memprediksi status *Financial distress***

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yaitu keselarasan belanja mempunyai kemampuan dalam memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ketiga ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,023 dan koefisien -2.570. Nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih kecil daripada nilai alpha (0,05) atau ( $< 0,05$ ), sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan keselarasan belanja berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress*. Maka penelitian ini berhasil mendukung hipotesis pertama.

Dukungan bahwa Keselarasan belanjamampu dalam memprediksi status *financial distress* juga sejalan dengan pernyataan Rusdi (2018) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan operasional dari pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan secara merata, maka dibutuhkan penataan system pengeluaran dan pembelanjaan yang tepat guna. Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah, namun tidak sejalan dengan hasil temuan penelitiannya yang menemukan keselarasan belanja tidak berpengaruh terhadap *financial distress*

#### **Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja dalam memprediksi status *Financial distress***

Hipotesis keempat ( $H_4$ ) yaitu Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress*. Hasil pengujian hipotesis keempat ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,014. Nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih kecil daripada nilai alpha (0,05) atau ( $< 0,05$ ), sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi dan keselarasan belanja secara bersama-sama berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress*. Maka penelitian ini berhasil mendukung hipotesis keempat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Parsial Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien sebesar 46.004 dengan nilai signifikan sebesar 0,302 dimana nilai signifikannya  $> 0,05$ .
2. Secara Parsial Derajat Desentralisasi tidak berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien sebesar -70.426 dengan nilai signifikan sebesar 0,239 dimana nilai signifikannya  $> 0,05$ .
3. Secara Parsial Keselarasan belanja berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien sebesar -2.570 dengan nilai signifikan sebesar 0,023 dimana nilai signifikannya  $< 0,05$ .
4. Secara Simultan Kemandirian keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,014 dimana nilai signifikansinya lebih kecil dari  $< 0,05$ .

### Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah daerah disarankan melakukan upaya untuk lebih mengoptimalkan belanja modal dalam mendorong pembangunan infrastruktur untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar dan lebih baik kepada masyarakat sehingga terhindar dari kondisi *financial distress*.
2. Untuk peneliti selanjutnya Menggunakan indikator atau variabel lain yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pemerintah daerah karena nilai Nagelkerke  $R^2$  yang dihasilkan baru 26,6% sehingga masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *financial distress* dan dapat terlebih dahulu melakukan analisis faktor dalam memilih variabel-variabel yang akan diteliti, agar dapat meningkatkan ketepatan prediksi model.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Erlina et al. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Gio, Prana Ugiana dan Rosmaini, Elly. 2016. *Belajar Olah Data dengan SPSS, MINITAB, R, MICROSOFT EXCEL, EVIEWQ, LISREL, AMOS, dan SMARTPLS*. Medan: USU Press.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2014. *Teori konsep Dan Aplikasi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hosmer, David W.& Lemeshow, Stanley. 2000. *Applied Logistic Regression*. Canada: John Willey & Sons, Inc.
- Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangulang, Agussalim. 2010. *Metodologi Penelitian*, Ekasakti Press, Padang
- Sekaran, Uma. 2009. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widarjono, Agus. 2015. *Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2
- Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang.
- Agustina Oesi, 2013. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang* .[jurnal]. Universitas Brawijaya.malang.
- Bisma, I Dewa Gede dan Susanto Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Ganec Swara Edisi Khusus Universitas Mataram, Vol. 04, No. 03, hal 75-86
- Clark, T. N. 1977. "Fiscal Management of American Cities: Funds Flow Indicators". *Journal of Accounting Research*, Vol. 15 (Supplement).
- Cohen, Sandra et al. 2012. "Assessing Financial Distress Where Bankruptcy Is Not An Option: An Alternative Approach For Local Municipalities". *European Journal of Operational Research* (218): 270-279.
- Dwijayanti, SP, Febrina. 2010. "Penyebab, Dampak, dan Prediksi dari Financial Distress serta Solusi untuk Mengatasi Financial Distress". *Jurnal Akuntansi Kontemporer*. Vol 2 (2): 191-205.
- Emerson, R. M. 1961. *Power-Dependence Relations*. *American Sociological Review*, 27(1): 31-41
- Etikan, et al. 2016. "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling". *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*. Vol 5 (1):1-4.
- Inekwe et al. 2017. "The Effect of Financial Distress : Evidence from US GDP Growth". *Economic Modelling*. 1-14.

- Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. "Explanators of Local Government Distress". *ABACUS*. 43(3): 396-418
- Noviandri, Tio. 2014. "Peranan Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Sektor Perdagangan". *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol 2 (4).
- Pratiwi, Mutiara Galuh. 2018. "Prediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2014". *Naskah Publikasi*. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rukmana, Wan Vidi. 2013. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Rusdi, Dedidan Khairul Fuad. 2018. "Metode Prediksi Financial Distress Di Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Untuk Mengukur Kesejahteraan Ummat". *Akuntansi Dewantara*. Vol. 2 (1).
- Sartika, Dewi. 2016. "Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2011-2013". *Naskah Publikasi*. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sepang et al. 2012. "Penerapan Regresi Logistik untuk Menentukan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Jenis Alat Kontrasepsi di Kecamatan Modayag Barat". Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal MIPA Unsrat Online* 1(1):1-5.
- Sutaryo et al. 2012. "Relevansi Informasi Laporan Keuangan Cash Modified Basis: Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia". *Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi*.
- Syurmita. 2014. "Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok, Universitas Mataram.
- Turaboglu et al. 2017. "Finansal Basarizlik ve Sermaye Yapisi Kararlari: BIST 100 Endeksindeki Firmalar Uzerine Bir Uygulama". *Business and Economics Research Journal*. Vol 8 (2): 247-258.
- Yanti, Rida Damai. 2018. "Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016". *Jurnal UNP*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2016. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- <http://www.bpk.go.id>
- [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)
- <https://seknasfitra.org>
- [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)